IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN SEBAGAI UPAYA MENGATASI KEMISKINAN DI DESA ROKO-ROKO KECAMATAN WAWONII TENGGARA KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Hesri¹, Darmin Tuwu², Iwan Patta³

¹Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Halu Oleo, hesri123@gmail.com

²Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Halu Oleo, darminuwu@gmail.com

³Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Halu Oleo, iwanpatta@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that influence the implementation of the poor rice program (Raskin) as an effort to overcome poverty in Roko-Roko Village, Southeast Wawonii District, Islands Konawe District. The research method used in this research is descriptive qualitative. While the data collection techniques used are observation, interview and documentation techniques. The informants in this study were the Village Head, Village Secretary, one of the RT Heads and fifteen people who received Raskin. Data sources used are primary data sources and secondary data sources. The data analysis technique is descriptive qualitative. The results showed that the implementation of the poor rice program as an effort to overcome poverty in the village of Roko-Roko was not going well as expected. This is due to factors that greatly affect the success of implementation such as communication factors, resource factors, disposition factors, and bureaucratic structure factors. In the implementation of the Raskin program, it has not run optimally due to the lack of communication in the form of socialization conducted by the Village Government with the community, the Raskin program implementing apparatus has not been able to carry out their duties properly, the price determination is not in accordance with the general Raskin guidelines or government regulations. And as for the obstacles in implementing the Raskin program, the Raskin distribution schedule is often late and the Raskin distribution is not on target.

Key Words: *Implementation of the Raskin program, poor families.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program beras miskin (Raskin) sebagai upaya mengatasi kemiskinan di Desa Roko-Roko Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, salah satu Ketua RT dan lima belas orang masyarakat yang mendapatkan Raskin. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik analisis data adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program beras miskin sebagai upaya mengatasi kemiskinan di Desa Roko-Roko belum berjalan dengan baik seperti yang diharapkan. Hal ini dikarenakan faktor-faktor yang sangat memengaruhi keberhasilan implementasi seperti faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi, dan faktor struktur birokrasi. Dalam implementasi program Raskin belum berjalan optimal karena masih kurangnya komunikasi dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan masyarakat, aparat pelaksana program Raskin belum mampu menjalankan tugasnya dengan baik, penetapan harga tidak sesuai dengan pedoman umum Raskin atau ketentuan pemerintah. Dan adapun kendala dalam implementasi program Raskin yaitu jadwal Pembagian Raskin yang sering terlambat dan pembagian Raskin yang tidak tepat sasaran.

Kata-kata Kunci: *Implementasi program raskin, keluarga miskin.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang sering kali hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan sesungguhnya merupakan suatu kondisi yang ditolak oleh manusia, tetapi kenyataannya sulit untuk dihindarkan. Hal ini merupakan masalah sosial penting yang perlu ditangani negara dan juga sangat membutuhkan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Kemiskinan adalah konsep abstrak yang dapat

dijelaskan secara berbeda tergantung dari pengalaman, perspektif, sudut pandang yang diambil, atau ideologi yang dianut (Darwin, 2005).

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2016, persentase jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 10, 86%. atau 28,01 juta jiwa orang. Persentase ini sedikit menurun, jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Indonesia Maret 2015 yang berada pada persentase 11,22% atau mencapai 28,59 juta jiwa. Data tersebut menunjukkan adanya penurunan persentase penduduk miskin di Indonesia, diselang waktu satu tahun terakhir ini. Persentase tersebut juga menunjukkan bahwa ada usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menangani masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Persoalan kemiskinan yang dihadapi oleh negara ini belum dapat diselesaikan, salah satu penyebab dari kemiskinan tersebut yaitu karena belum meratanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk menyikapi masalah kemiskinan pemerintah pusat mengupayakan banyak program yang dapat menghambat laju pertumbuhan jumlah penduduk miskin. Menurut Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI Direktorat Jendral Informasi Dan Komunikasi Publik (2011), ada 3 klaster yang diluncurkan dalam program penanggulangan kemiskinan yaitu klaster I (satu) merupakan kelompok program penanggulangan kemiskinan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, yang terdiri dari program keluarga harapan (PKH), bantuan operasional sekolah (BOS), program bantuan siswa miskin (BSM), program jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS), program beras untuk keluarga miskin (Raskin). Klaster II (dua) merupakan kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) dan program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja/padat karya produktif. Klaster III (tiga) merupakan kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang terdiri dari program kredit usaha rakyat (KUR) dan usaha bersama (KUBE).

Berdasarkan klaster program penanggulangan kemiskinan tersebut, peneliti memilih salah satu program penanggulangan kemiskinan yaitu program bantuan beras miskin (Raskin), karena program Raskin merupakan salah satu program pemerintah sebagai wujud komitmen pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu.

Program penyaluran beras untuk keluarga miskin (Raskin) adalah sebuah program dari pemerintah. Program ini dilaksanakan dibawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor : 25 Tahun 2003 dan Nomor : PKK-12/07/2003, yang melibatkan instansi terkait, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Program Raskin ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga dengan memberikan perlindungan sosial beras murah dengan jumlah maksimal 15 Kg/rumah tangga miskin/bulan dengan masing-masing seharga Rp. 1.600,00/Kg (Netto) dititik distribusi. Program ini mencakup di seluruh provinsi, sementara tanggung jawab dari distribusi beras dari gudang sampai ke titik distribusi dipegang oleh Perum Bulog (Depdagri, 2008).

Tujuan pemerintah dalam program Raskin ini tidak mungkin luput dalam penyimpangan. Ada masalah dalam penyaluran program Raskin. Mengenai salah sasaran. Program Raskin yang semestinya disalurkan atau dijual kepada keluarga-keluarga miskin ternyata jatuh pada kelompok masyarakat lain (keluarga sejahtera). Salah sasaran ini banyak disebabkan oleh *human error*, di mana para petugas lapangan justru membagi-bagikan kupon Raskin pada keluarga dekat atau teman kerabatnya. Bahkan tidak sedikit keluarga sejahtera yang "menagih jatah" beras murah tersebut. Menurut Lembaga Penelitian SMERU menyatakan bahwa program Raskin menjangkau 52,6% rumah tangga miskin dan 36,9% termasuk rumah tangga bukan miskin (keluarga sejahtera). Bahkan Raskin lebih banyak diterima oleh rumah tangga bukan miskin (World Bank 2006).

Menurut TNP2K terdapat indikator 6T untuk mengukur tingkat keberhasilan Raskin, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Secara umum, hasil kajian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program Raskin relatif rendah. Indikasinya terlihat dari kurangnya sosialisasi dan transparansi, kekurangtepatan target penerima, harga, jumlah, dan frekuensi penerimaan beras, tingginya biaya pengelolaan program, belum optimalnya pelaksanaan monitoring, dan kurang berfungsinya mekanisme pengaduan.

Desa Roko-Roko merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan dan merupakan Desa penerima program penanggulangan kemiskinan. Adapun program penanggulangan kemiskinan yang ada di Desa Roko-Roko yaitu seperti bantuan langsung tunai (BLT), bantuan operasional sekolah (BOS), program beras miskin (Raskin), dan bantuan siswa miskin (BSM), karena masih banyak terdapat masyarakat miskin di Desa tersebut.

Berdasarkan program penanggulangan kemiskinan tersebut, peneliti memilih salah satu Program penanggulangan kemiskinan yaitu program bantuan beras miskin (Raskin), karena dalam pelaksanaannya program beras miskin ini kerap kali terjadi masalah-masalah yang dihadapi pelaksana maupun masyarakat miskin sebagai penerima beras miskin. Salah satunya ialah masih banyaknya masyarakat yang sejahtera tetapi tetap mendapatkan beras miskin. Hal ini dikarenakan data dari kantor statistik yang diterima Kecamatan atau Desa merupakan data lama (belum diperbaharui) sehingga tidak akurat untuk keadaan sekarang. Dimana ada masyarakat yang telah sejahtera tetap menerima beras miskin karena data yang diterima menyatakan bahwa masyarakat tersebut masih dalam kategori miskin.

Hal ini membuktikan bahwa masih kurangnya sosialisasi mengenai beras miskin ini kepada masyarakat khususnya di Desa Roko-Roko Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan. Permasalahan lainnya ialah pendistribusian beras miskin kepada masyarakat yang kadang datang terlambat. Pendistribusian ini dilakukan dengan cara mengunjungi rumah warga kepada penerima beras miskin satu persatu, dikarenakan tidak adanya jadwal yang pasti mengenai datangnya beras miskin ini dari Bulog. Saat ini diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Roko-Roko sebanyak 202 Kepala Keluarga (KK) dan 95 Kepala Keluarga (KK) yang termasuk penduduk miskin yang mendapatkan Raskin.

Dari paparan mengenai program beras miskin tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan distribusi beras miskin masih terdapat kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan sistem seperti masih banyaknya masyarakat yang sejahtera tetapi tetap mendapatkan beras miskin, dan

pendistribusian beras miskin kepada masyarakat yang kadang datang terlambat. Sehingga penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “ Implementasi program beras miskin (Raskin) sebagai upaya mengatasi kemiskinan di Desa Roko-Roko Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan”.

Menurut Dunn (2003), proses pembuatan kebijakan merupakan serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart (*dalam* Winarno, 2002) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan tehnik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak dan tujuan yang diinginkan.

Mazmanian dan Sabatier (*dalam* Agustino, 2006), menjelaskan makna implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat.

Dari definisi-definisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yakni:

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan.
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan.
3. Adanya hasil kegiatan

Berdasarkan uraian ini, penulis dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan adalah merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Kebijakan sosial menurut Jamrozik (*dalam* Adi, 2013) merupakan suatu mekanisme untuk mengalokasikan sumber daya masyarakat agar masyarakat dapat mencapai hasil yang mereka inginkan, dimana di dalamnya ada keterkaitan antara objektif dan tujuan masyarakat, yang dicapai melalui cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai yang dominan di masyarakat tersebut, serta pada sisi berikutnya akan memperkuat nilai-nilai dominan pada masyarakat tersebut. Di sini, Jamrozik (*dalam* Adi, 2013) menekankan bahwa pada intervensi melalui kebijakan sosial, pemerintah pada level tertentu juga melibatkan lembaga legislative (sebagai pihak yang membuat kebijakan sosial) mencoba mengalokasikan berbagai sumber daya yang dimiliki masyarakat guna mencapai tujuan pembangunan baik objektif maupun tujuan jangka panjang, yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai yang ada di masyarakat itu sendiri. Keberhasilan dari suatu kebijakan sosial, pada sisi lain akan memperkuat nilai-nilai dominan pada masyarakat itu sendiri.

Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut George C Edward (*dalam* Subarsono, 2005) adalah (1) Faktor Komunikasi; dan (2) Faktor Sumber Daya.

Program beras untuk rumah tangga miskin merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu penyediaan sebagai kebutuhan pangan pokok keluarga miskin. Melalui pelaksanaan program raskin bersama program penanggulangan kemiskinan lainnya diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial rumah tangga. Selain itu program Raskin merupakan program tranfer energi dalam bentuk kalori yang dapat mendukung program lainnya (Depdagri dan Perum Bulog, 2008).

Menurut TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sebagai berikut :

1. Ketepatan sasaran dari program Raskin ini, artinya program ini harus benar-benar menyasar kepada rumah tangga miskin yang membutuhkan sesuai dengan data yang ada.
2. Ketepatan jumlah, artinya terpenuhinya jumlah yang seharusnya didapatkan RTS secara penuh dan tidak ada pembatasan atau pengurangan, sehingga masyarakat merasakan ada manfaat positif yang dapat mereka rasakan yaitu dari membeli beras dengan harga murah.
3. Ketepatan kualitas, artinya apakah beras yang didistribusikan sudah bisa dikatakan layak untuk dikonsumsi atau bahkan kualitasnya lebih baik dari tahun-tahun distribusi sebelumnya.
4. Ketepatan waktu, keberhasilan dari program ini juga harus bisa diukur juga dari ketepatan waktunya, artinya beras ini harus tepat waktu diterima RTS dan tidak lagi mengalami keterlambatan dalam implementasinya.
5. Ketepatan harga, harga tebus yang diberikan kepada masyarakat miskin harus sesuai dengan harga yang telah ditetapkan yakni Rp.1.600 untuk 1 kg beras Raskin.
6. Ketepatan administrasi, terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu.

Kendala-kendala dalam implementasi Beras Miskin selain masalah mengenai sosialisasi dan transparansi yang kurang, juga ada beberapa faktor lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan subsidi Raskin atau beras miskin, diantaranya :

1. Jumlah Raskin yang diterima masyarakat kurang dari 10 kg karena jumlah rumah tangga yang disepakati dalam mudes lebih tinggi dibanding dengan data yang di keluarkan BPS.
2. Jadwal pembagian Raskin yang sering terlambat
3. Kualitas beras buruk
4. Kondisi geografi menghambat pendistribusian Raskin ke titik distribusi.
5. Masih banyak warga miskin yang belum terakomodir dalam daftar RTS-PM Raskin.
6. Pembagian Raskin tidak tepat sasaran (<http://www.academia.edu>).

Secara umum, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Salah satu konsep perhitungan kemiskinan yang diterapkan di banyak Negara, termasuk Indonesia, adalah konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan konsep ini, definisi kemiskinan yang sangat luas mengalami penyempitan makna karena kemiskinan

hanya dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (Suhariyanto, 2011).

Menurut Suharto (2009) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah social yang bersifat global. Artinya, kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang di dunia ini. Meskipun dalam tingkatan yang berbeda, tidak ada satupun Negara di jagat raya ini yang “kebal” dari kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya dijumpai di Indonesia, India, Sri Lanka dan Argentina, melainkan pula ditemukan di Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Australia, maupun Hongaria. Semua Negara di dunia ini sepakat bahwa kemiskinan merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradaban. Semua umat manusia di planet ini setuju bahwa kemiskinan harus dan bisa ditanggulangi.

Miskin juga didefinisikan sebagai ketidakmampuan berpartisipasi dalam bermasyarakat secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, bentuk kemiskinan tidak hanya unidimensi tetapi mencakup juga kemiskinan insani dan kemiskinan martabak, (Lubis, 2004).

Penyebab kemiskinan menurut Suharto (2009) bisa diakibatkan oleh empat faktor, yaitu: (1) Faktor individual, Terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis si miskin. Orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupannya. (2) Faktor sosial, Kondisi-kondisi lingkungan yang menjebak seseorang menjadi miskin. Misalnya, diskriminasi berdasarkan usia, jender, etnis yang menyebabkan seseorang menjadi miskin, termasuk dalam faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga si miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi. (3) Faktor kultural, Kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secara khusus sering menunjuk pada konsep “kemiskinan kultural” atau “budaya kemiskinan” yang menghubungkan dengan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas. (4) Faktor struktural, Menunjuk pada struktural atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif dan tidak *accessible* sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Sebagai contoh, sistem ekonomi neoliberalisme yang diterapkan di Indonesia telah menyebabkan para petani, nelayan, dan pekerja sektor informal terjerat oleh, dan sulit keluar dari, kemiskinan sebaliknya, stimulus ekonomi, pajak dan iklim investasi lebih menguntungkan orang kaya dan pemodal asing untuk terus menumpuk kekayaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini telah dilaksanakan di Desa Roko-Roko Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan. Dengan pertimbangan bahwa di Desa Roko-Roko merupakan salah satu Desa yang menerima program Raskin.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (*dalam* Thohirin, 2013) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini, penelitian deskriptif kualitatif akan digunakan untuk mendeskripsikan mengenai implementasi program Raskin sebagai upaya mengatasi kemiskinan di Desa Roko-Roko Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan.

Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana menurut Sugiyono (2009) *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan

tertentu misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang informasi yang peneliti harapkan atau dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi tertentu. Adapun yang menjadi informan yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa dan salah satu Ketua RT yang melaksanakan program Raskin, dan masyarakat yang menerima Raskin karena mereka adalah orang-orang yang langsung terlibat dan merasakan program Raskin.

Teknik pengumpulan data menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu: Observasi, Wawancara, dan dokumentasi (Soewadji, 2012).

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan, dan bahan lainnya sehingga mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam hal ini kegiatan yang digunakan dalam menganalisis data yang ada adalah dengan metode kualitatif deskriptif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan dan deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan yang telah diamati (Moleong, 2005). Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan data, dan selanjutnya peneliti mendeskripsikan data. Pendeskripsian data ini dilakukan agar memperoleh gambaran yang jelas dari data-data yang telah dikumpulkan berkaitan dengan implementasi program Raskin sebagai upaya mengatasi kemiskinan.

PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Raskin Sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan Di Desa Roko-Roko Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan

Salah satu tolak ukur keberhasilan suatu program adalah terletak pada proses implementasinya dan pada tahap implementasi ini merupakan tahap yang paling penting dalam keseluruhan suatu program dalam menilai suatu program dapat dikatakan berhasil atau tidak. Terdapat semacam rumus dalam ilmu administrasi dan manajemen yang mengatakan bahwa ujian terakhir dalam proses kegiatan organisasi terletak pada implementasi. Sasaran program Raskin adalah rumah tangga atau masyarakat yang dikategorikan miskin.

Desa Roko-Roko merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan yang mendapatkan program raskin untuk keluarga miskin. Program raskin ini diharapkan mampu membantu masyarakat yang kurang mampu atau miskin di Desa Roko-Roko dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam bentuk beras murah. Berdasarkan pengamatan itu telah disebutkan bahwa tujuan dari pendistribusian raskin ialah untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi Program Raskin di Desa Roko-Roko terdiri dari dua tahap, yaitu dari Bulog sampai pada titik distribusi dan dari titik distribusi sampai pada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dengan melewati titik bagi.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program beras miskin (Raskin) yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Komunikasi

Salah satu penentu utama dari suatu keberhasilan dalam implementasi kebijakan publik adalah komunikasi. Komunikasi diperlukan sebagai proses penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran. Dengan adanya komunikasi yang baik antara kebijakan dengan target atau sasaran tersebut, maka implementasi akan menjadi efektif apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan dengan bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementator akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Karena faktor komunikasi merupakan proses penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran. Sosialisasi adalah aspek penting dalam keberhasilan berjalannya program Raskin ini. Implementasi program Raskin ini tidak akan berhasil jika tanpa adanya sosialisasi dalam Organisasi (internal) maupun (eksternal) dalam pelaksanaan, sehingga koordinasi antara instansi yang terkait bisa berjalan dengan baik berhubungan dengan program Raskin ini. Tujuan Sosialisasi ini adalah menyebarkan informasi berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran beras ke titik pendistribusian dan RTM (rumah tangga miskin). Sedangkan komunikasi didalam implementasi Program Raskin di Desa Roko-Roko menunjukkan bahwa komunikasi pihak Desa dengan warga penerima raskin belum berjalan dengan baik, terlihat masih adanya ketimpangan antara informasi yang diterima oleh penerima Raskin yang satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian dalam melakukan proses implementasi berkaitan dengan komunikasi dalam implementasi program Raskin yang terjalin saat ini kurang baik, karena pelaksana sosialisasi sangat jarang dilakukan kepada masyarakat sehingga pengetahuan masyarakat tentang Raskin sangat minim. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Desa Roko-Roko tentang sosialisasi berikut ini:

“Untuk sosialisasi tentang program Raskin di Desa Roko-Roko ini saya akui memang jarang diadakannya sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan program Raskin ini, karena dari pihak implementator yang berkaitan dengan pelaksanaan program Raskin ini masih kurang perhatian dalam melaksanakan sosialisasi. Sehingga kami dari pihak Desa jarang melakukan sosialisasi berkaitan dengan program Raskin ini, dan kami juga hanya bertugas sebagai penyalur Raskin terhadap masyarakat miskin” (Wawancara dengan Bapak Abarudin Tanggal 9 Januari 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Roko-Roko di atas dapat dikatakan bahwa komunikasi antara pihak pemerintah dengan masyarakat di Desa Roko-Roko belum efektif hal ini sesuai dengan penjelasan dari Kepala Desa Roko-Roko bahwa mereka jarang mengadakan sosialisasi dengan masyarakat mengenai penyaluran beras miskin tersebut. Sedangkan salah satu faktor penentu utama dari suatu keberhasilan dalam implementasi adalah komunikasi. Karena faktor komunikasi merupakan proses penyampaian informasi kepada pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran. Dengan adanya komunikasi dalam bentuk sosialisasi yang baik antara kebijakan dengan target atau sasaran, maka implementasi akan menjadi efektif. Karena tujuan dari diadakannya sosialisasi ini adalah menyebarkan informasi berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran beras ke titik pendistribusian kepada rumah tangga miskin (RTM).

Apa yang telah dipaparkan oleh Kepala Desa Roko-Roko di atas juga diperkuat dengan penjelasan Sekertaris Desa Roko-Roko tentang sosialisasi berikut ini:

“Untuk masalah sosialisasi ini jarang dilaksanakan karena kegiatan ini sudah cukup lama dan saya rasa masyarakat sudah tau atau memahami informasi tentang program Raskin karena program Raskin ini sudah ada sejak tahun 2002 dulu” (Wawancara dengan Bapak Hadrawing Tanggal 12 Januari 2017).

Dalam hal ini diharapkan dari berbagai pihak aparat dapat mensosialisasi kan kegiatan ini dengan baik, akan tetapi jika dilihat dari wawancara di atas dapat dikatakan bahwa masyarakat dan aparat pelaksana sudah terbiasa dengan kegiatan ini tanpa dilakukan sosialisasi pun kegiatan pembagian Raskin berjalan dengan baik. Aparat pelaksana program Raskin di Desa Roko-Roko memahami informasi tentang program Raskin karena program Raskin ini sudah ada sejak tahun 2002 jika ada informasi baru biasanya tidak terlalu banyak perubahan sehingga aparat pelaksana Raskin dapat dengan cepat menerima dan memahaminya.

Berdasarkan apa yang telah diungkapkan oleh Sekertaris Desa Roko-Roko tentang sosialisasi di atas juga dipertegas oleh informan berikut ini:

“Setahu saya tidak pernah diadakannya sosialisasi mengenai program Raskin ini, saya saja dapat bantuan Raskin ini karena diberitahukan langsung oleh pak RT-nya. Jadi wajar kalau masyarakat seperti saya ini tidak tau mengenai apa saja ketentuan yang ada dalam bantuan beras miskin ini” (Wawancara dengan Ibu Zainap Tanggal 14 Januari 2017).

Berdasarkan pernyataan informan dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Raskin dikarenakan kurangnya faktor komunikasi dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat Sehingga pengetahuan tentang program Raskin kurang dimengerti. Kurangnya sosialisasi dari para implementator pastinya akan berpengaruh pula pada proses implementasi, karena tanpa proses sosialisasi masyarakat tidak akan tahu tentang sebuah kebijakan. Karena sosialisasi merupakan aspek penting dalam keberhasilan berjalannya program Raskin ini.

Apa yang telah dipaparkan oleh informan di atas juga diperkuat dengan penjelasan informan tentang sosialisasi berikut ini:

“Menurut saya selama ini tidak pernah diadakannya sosialisasi dengan masyarakat mengenai program Raskin, biasanya yang mengikuti sosialisasi itu hanya Kepala Desa dan aparat-aparat Desa saja seperti ketua RT dan Ketua Dusun saja Setelah itu Barulah disampaikan kepada kami”(Wawancara dengan Ibu Yuliana, Tanggal 19 Januari 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat dikatakan bahwa sosialisasi hanya dilakukan dengan pemerintah Desa saja, selanjutnya hasil dari musyawarah diinformasikan kepada warga melalui ketua RT dan masyarakat tidak pernah terlibat dalam sosialisasi mengenai program Raskin. sehingga pengetahuan masyarakat tentang program Raskin ini kurang dimengerti, tanpa proses sosialisasi masyarakat tidak akan tahu tentang sebuah kebijakan. Karena Sosialisasi merupakan aspek penting dalam keberhasilan berjalannya program Raskin ini.

2. Faktor Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam proses implementasi. Tanpa ketersediaan sumber daya yang memadai maka pelaksanaan implementasi akan mengalami hambatan. Komponen sumber daya ini meliputi staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program. Dalam mengimplementasikan kebijakan sumber daya manusia merupakan kunci bagi diselenggarakannya kebijakan karena manusia berada diposisi sebagai pengolah kebijakan dan merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu implementasi program. Selain itu juga, fasilitas sangat diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program seperti kantor, peralatan serah dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan seperti kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil.

Dalam pelaksanaan implementasi program Raskin untuk masyarakat miskin di Desa Roko-Roko tentang sumber daya manusia dalam pelaksanaan program beras miskin untuk keluarga miskin mengenai jumlah aparat yang bertugas cukup memadai. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Desa Roko-Rokotentang jumlah pemerintah Desa Roko-Roko dalam pelaksanaan program Raskin berikut ini:

“Jumlah aparat dalam pelaksana Raskin di Desa Roko-Roko ini terdiri dari 11 orang termasuk saya sendiri selaku Kepala Desa, Sekertaris Desa, ketua Dusun dan untuk Pelaksanaan di lapangan saat pembagian Raskin dibantu oleh ketua-ketua RT. Menurut saya jumlah tersebut sudah cukup memadai” (Wawancara dengan Bapak Abarudin Tanggal 9 Januari 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Roko-Roko di atas dapat dikatakan bahwasumber daya manusia di Desa Roko-Roko tentang Jumlah pemerintah Desa dalam proses pelaksanaanprogram Raskin ini terdiri dari Kepala Desa dan dibantu dengan Aparat-Aparat Desa. Jumlah tersebut sebenarnya sudah memadai karena selama ini terbukti dalam setiap pendistribusian Raskin tidak pernah menghadapi kendala yang berarti.

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Kepala Desa Roko-Roko di atas dipertegas juga oleh informan tentang jumlah pemerintah desa dalam pelaksanaan program Raskin berikut ini:

“ Kalau untuk jumlah pelaksana Raskin di Desa Roko-Roko ini belum cukup karna kalauditlihat dari kualitasnya belum mempunyai kemampuan yang cukup memadai” (Wawancara dengan Ibu Wamuna Tanggal 28 Januari 2017).

Seperti yang dikemukakan oleh informan di atas dapat diketahui bahwa jumlah sumber daya manusia di Desa Roko-Roko dalam pelaksanaan program Raskin belum memadai karena jika dilihat dari kualitasnya belum mempunyai kemampuan yang memadai mengingat tugas dan tanggung

jawab dalam pelaksanaan program Raskin ini selalu mendapatkan hambatan. Sedangkan dalam mengimplementasikan kebijakan suatu program sumber daya manusia merupakan kunci bagi diselenggarakannya kebijakan karena manusia berada diposisi sebagai pengolah kebijakan dan merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu implementasi program tersebut.

Apa yang telah dipaparkan oleh informan di atas diperkuat pula oleh informan tentang jumlah pemerintah Desa Roko-Roko dalam pelaksana program Raskin berikut ini:

“Menurut pendapat saya, ya memang jumlahnya sudah memadai tetapi semua tidak aktif terlibat, sebab yang aktif dalam pelaksana program Raskin ini hanya sebagian saja sedangkan aparat yang lain tidak aktif”(Wawancara dengan Ibu Wansia Tanggal 23 Januari 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat dikatakan bahwa program Raskin di Desa Roko-Roko secara kuantitas sudah tersedia sumber daya manusia yang memadai tetapi yang aktif dalam pelaksanaan penyaluran Raskin hanya sebagian saja sedangkan aparat yang lain tidak aktif.

Tentang kemampuan pemerintah Desa Roko-Roko dalam pelaksanaan implementasi program Raskin sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak RT berikut ini:

“Menurut pengamatan saya semua aparat pelaksana cukup mampu, cuman tingkat kerajinan ada yang rajin dan ada juga yang kurang, maklum karakternya memang berbeda-beda tetapi secara umum aparat pelaksana Raskin mampu melaksanakan tugasnya dengan baik” (Wawancara dengan Bapak Salim Tanggal 13 Januari 2017).

Berdasarkan hasil pernyataan informan di atas dapat dikatakan bahwa aparat pelaksana Raskin di Desa Roko-Roko sudah cukup mampu dalam menjalankan tugasnya tetapi tingkat kerajinan mereka berbeda-beda, ada yang rajin dan ada juga yang malas karena karakter masing-masing orang berbeda-beda.

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Pak RT Desa Roko-Roko di atas dipertegas pula oleh informan tentang kemampuan pemerintah Desa Roko-Roko dalam pelaksanaan program Raskin berikut ini:

“ Menurut saya aparat Desa dalam menjalankan tugasnya itu belum optimal karena setiap pembagian Raskin mereka jarang sekali memberi tahu kepada kami, saya saja tau kalau Raskin akan dibagikan diberitahukan sama tetangga saya seharusnya kan Pak RT-nya yang bertugas untuk datang memberitahukan kepada saya dan kadang pula kalau saya pergi mengambil Raskinnya di kantor orang yang bertugas tidak ada di tempat karena mereka selalu sibuk dengan urusannya masing-masing” (Wawancara dengan Ibu Rana Tanggal 30 Januari 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat dikatakan bahwa Kemampuan aparat pelaksana program Raskin di Desa Roko-Roko dalam menjalankan tugasnya belum optimal karena masyarakat yang menerima Raskin tidak dilayani dengan baik. Sedangkan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam proses implementasi. Karena itu sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam suatu kebijakan karena

kesuksesan proses implementasi bergantung kepada sumber daya manusia yang bertanggung jawab dan berperan dalam kebijakan.

Apa yang telah dipaparkan oleh informan di atas juga diperkuat dengan penjelasan informan tentang kemampuan pemerintah Desa Roko-Roko dalam pelaksanaan program Raskin berikut ini:

“ Aparat pelaksana Raskin di Desa Roko-Roko belum mampu melaksanakan tugasnya dengan baik terbukti selama ini kami tidak dilayani dengan baik karena biasanya kalau kami pergi mengambil Raskin di kantor Desa kadang aparat pelaksana yang bertugas untuk membagikan Raskin itu tidak ada di tempat”(Wawancara dengan Ibu Waasi tanggal 30 Januari 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat dikatakan bahwa kemampuan aparat pelaksana program Raskin di Desa Roko-Roko belum mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas sumber daya manusia dalam proses pelaksanaan Raskin di Desa Roko-Roko secara kualitas maupun kuantitas belum memadai. Hal ini terbukti aparat pelaksana program Raskin yang bertugas untuk membagikan atau mendistribusikan Raskin kepada masyarakat tidak dilayani dengan baik karena mereka selalu sibuk dengan urusan mereka masing-masing.

3. Faktor Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Program Raskin adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Sikap/respon implementor terhadap kebijakan, kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

Dalam rangka pelaksanaan implementasi program Raskin di Desa Roko-Roko terkait tingkat komitmen dan kejujuran masih rendah. masih ada saja permasalahan yang terjadi di dalam pelaksanaan penyaluran beras Raskin. Salah satunya yaitu harga Raskin tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp 1.600,00/kg, melainkan di atas ketentuan yang berlaku di titik distribusi.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan tentang harga Raskin yang diberikan kepada masyarakat berikut ini:

“Harga Raskin yang diberikan kepada kami Rp. 3.500 per kg, menurut Pak RT itu memang sudah ditetapkan karena untuk menutupi biaya trasportasinya” (Wawancara dengan Ibu Sanawia Tanggal 19 Januari 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat dikatakan bahwa harga Raskin yang harus dibayar masyarakat penerima Raskin di Desa Roko-Roko adalah Rp. 3.500 per kg. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah yang masing-masing rumah tangga berhak mendapatkan Raskin dengan harga Rp.1.600 per kg dengan tujuan untuk membantu pengeluaran rumah tangga miskin dalam mengkonsumsi beras sebagai bahan pangan mereka. Namun harga tersebut berbeda setelah sampai ke tangan penerima manfaat Raskin karena mereka diharuskan membayarkan biaya transportasi pengangkutan dari Bulog ke titik pendistribusian harga di naikkan sekitar Rp. 1.900 untuk menutupi biaya angkut.

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh informan di atas dipertegas pula oleh informan tentang harga Raskin berikut ini:

“Harga beras yang saya bayar itu Rp. 3.500 per kg, jadi kalau 15 kg yang dibayar sebanyak Rp 52.500 menurut saya harga tersebut tidak terlalu mahal dan dapat dijangkau” (Wawancara dengan Ibu Rumiah Tanggal 16 Januari 2017).

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa harga beras yang dibayar penerima Raskin adalah Rp 3.500 per kg, jadi 15 kg yang dibayar Rp 52.500 dan harga tersebut tidak terlalu mahal dan dapat dijangkau oleh masyarakat. maka dapat dikatakan bahwa harga Raskin yang ditetapkan di Desa Roko-Roko tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, selisih harga antara Rp.3.500 dengan Rp.1.600 adalah Rp.1.900. Dengan selisih harga demikian dapat kita lihat bahwa harga Raskin di Desa Roko-Roko lebih mahal dibanding dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Apa yang telah dipaparkan oleh informan di atas diperkuat pula oleh Pak RT tentang harga beras miskin berikut ini:

“Sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah harga beras yang harus dibayar oleh masyarakat penerima Raskin adalah Rp1600/kg. Jadi karena mereka menerima 15 kg maka mereka membayar Rp. 24.000 . tapi kalo masuk di titik pendistribusian harganya ditambah sekitar Rp. 28.000 untuk biaya angkutnya atau trasportasinya” (Wawancara dengan Bapak Salim Tanggal 12 Januari 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak RT di atas dapat dikatakan bahwa harga beras yang harus dibayar oleh warga penerima Raskin adalah Rp. 3.500 per Kg termasuk biaya trasportasinya. Bagi warga masyarakat penerima Raskin harga tersebut tidak memberatkan dan masih bisa dijangkau oleh masyarakat penerima Raskin di Desa Roko-Roko. Dari wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pendistribusian Raskin di Desa Roko-Roko tidak tepat harga yaitu Rp 3.500 setiap per Kg. karena harus membayar sekitar Rp.1.900 untuk biaya operasional pengangkutan dari Bulog ke titik pendistribusian.

Dalam pelaksanaan implementasi program Raskin, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pedoman teknis tersebut tidak sepenuhnya terlaksana. Disposisi implementor tidak sesuai dengan

apa yang diamanatkan dalam kebijakan yang dijalankan. Pada umumnya impementor telah mengetahui substansi dari kebijakan yang dijalankan, tetapi dengan bekal dan pengetahuan dan pemahaman mengenai kebijakan yang dijalankan tidak cukup baik untuk membentuk sikap atau disposisi implemmentor yang baik.

4. Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Birokrasi merupakan sala satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya.

Para pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai cukup keinginan dan sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, tetapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut biasanya tidak dapat terlaksana dengan baik karena terdapatnya kelemahan dari stuktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebagiakan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalanya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Untuk keefektifan program Raskin maka dibentuk Tim koordinasi sebagai pertanggungjawab pelaksana program Raskin yaitu sebagai berikut:

a. Tim Koordinasi Raskin Pusat

Tim Koordinasi Raskin Pusat beranggotakan unsur dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Depatemen Sosial, Kementerian Negara BUMN, Badan Pusat Statistik, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Perum BULOG

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Pusat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

2. Tugas

Melaksanakan koordinasi kebijakan perencanaan dan anggaran, pelaksanaan dan distribusi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta menerima pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan Program Raskin.

3. Fungsi

Mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan Raskin sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kemiskinan

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Pusat

Tim Koordinasi Raskin Pusat terdiri dari Pengarah, Pelaksana dan Sekretariat. Pengarah terdiri dari Ketuadan unsur Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan anggota terdiri dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Sosial, BPS, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, BPKP dan Perum Bulog. Pelaksana terdiri dari Ketua, Wakil Ketua/Ketua Bidang dan Anggota. Ketua Pelaksana adalah Deputy Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Wakil Ketua I/Bidang Kebijakan Perencanaan adalah Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas; Wakil Ketua II/Bidang Kebijakan Anggaran adalah Direktur Anggaran III, Ditjen Anggaran Departemen Keuangan; Wakil Ketua III/Bidang Pelaksanaan dan Distribusi adalah Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog ;Wakil Ketua IV/Bidang Fasilitasi, Monev dan Pengaduan adalah Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat Ditjen PMD Departemen Dalam Negeri. Anggota Tim terdiri dari unsur-unsur Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Pertanian, Kementerian Negara BUMN, Badan Pusat Statistik, BPKP, dan Perusahaan Umum Bulog.

b. Tim Koordinasi Raskin Provinsi

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Provinsi adalah pelaksanaan Program Raskin di Provinsi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

2. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Provinsi mempunyai tugasnya merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan Program Raskin di wilayah Provinsi.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Provinsi mempunyai fungsi:

- a) Koordinasi perencanaan Program Raskin di Provinsi.
- b) Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, penyebarluasan informasi Program Raskin.
- c) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.
- d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten/Kota.

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Provinsi

Tim Koordinasi Raskin Provinsi terdiri dari Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: Perencanaan, Pelaksanaan Distribusi, Monev dan Pengaduan Masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Tim Koordinasi Raskin Provinsi beranggotakan unsur-unsur instansi terkait di tingkat Provinsi antara lain Setda, Bappeda, Badan/Instansi/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik, Badan/Instansi/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Perwakilan BPKP

dan Divisi Regional/Sub Divisi Regional Perum Bulog dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

c. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota adalah pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

2. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai tugasnya merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan Program Raskin di wilayah Kabupaten/Kota.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

- a) Merumuskan perencanaan Program Raskin di Kabupaten/Kota.
 - b) Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, penyebarluasan informasi Program Raskin di Kabupaten/Kota.
 - c) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi di Desa/Kelurahan.
 - d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan, Desa/Kelurahan.
4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota terdiri dari Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: Perencanaan, Pelaksanaan Distribusi, Monev dan Pengaduan Masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Tim Koordinasi Raskin Provinsi beranggotakan unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kabupaten/Kota antara lain Setda, Bappeda, Badan/Instansi/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik, Badan/Instansi/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Perwakilan BPKP dan Divisi Regional/Sub Divisi Regional Perum Bulog dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

d. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, sebagai berikut:

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugasnya merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan Program Raskin di wilayah Kabupaten/Kota.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi:

- a) Merumuskan perencanaan Program Raskin di Kecamatan
- b) Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, penyebarluasan informasi Program Raskin di Kecamatan.
- c) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana Distribusi di Kecamatan.
- d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Desa/Kelurahan.

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari Penanggung jawab yaitu Camat, Ketua yaitu Sekretaris Kecamatan, Sekretaris yaitu Kasi Kesejahteraan Sosial, dan Anggota terdiri dari aparat Kecamatan, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), anggota Satker Raskin dan pihak terkait yang dipandang perlu.

e. Pelaksana Distribusi Raskin Di Desa/Kelurahan

Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin di wilayahnya, sebagai berikut:

1. Kedudukan

Warung Desa berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

2. Tugas

- a) Menerima, menyimpan, menjual beras Raskin kepada RTS-PM yang telah ditetapkan melalui Musyawarah Desa/Kelurahan dan tercantum dalam model DPM-1 dengan harga Rp. 1.600/kg.
- b) Menyetorkan uang hasil penjualan Raskin kepada Satker Raskin.
- c) Membuat administrasi persediaan dan realisasi penjualan beras Raskin.

3. Fungsi

- a) Pendistribusian beras Raskin kepada RTS-PM.
- b) Penerimaan uang hasil penjualan beras Raskin secara tunai dari RTS-PM dan penyetornya kepada Satker Raskin atau ke rekening HPB Bulog di Bank yang ditetapkan.
- c) Pengadministrasian distribusi Raskin kepada RTS-PM.

Program Raskin di Desa Roko-Roko yang terkait dalam bidang tugas kegiatan yang melakukan program Raskin sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak sehingga tidak mudah untuk menyatukan langkah dalam melaksanakan tugas. Pihak yang terlibat di bawah satu komando, hal itu relatif mudah untuk mengkoordinasikannya akan tetapi jika pihak-pihak yang terlibat masing-masing mempunyai garis komando sendiri ini akan menyulitkan dalam implementasi kebijakan. Maka hal ini lah yang menjadi implementasi program Raskin di Desa Roko-Roko

dimana dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah melibatkan banyak instansi/dinas yang masing-masing mempunyai atasan sendiri-sendiri.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Desa Roko-Roko tentang orang-orang yang terlibat dalam penyaluran program Raskin berikut ini:

“ Program Raskin ini melibatkan banyak pihak, sehingga memerlukan proses yang banyak pula agar bisa disesuaikan dengan prosedur yang ada yang telah ditentukan oleh pihak yang menyediakan Raskin. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penyaluran Raskin ini seperti pihak pusat yang berwenang membuat kebijakan, pihak Bulog selaku penyedia beras miskin, pihak BPS yang bertugas mendata masyarakat yang layak menerima Raskin serta pihak Desa yang membantu mendistribusikan beras miskin ke masyarakat miskin”(Wawancara dengan Bapak Abaruddin Tanggal 9 Januari 2017).

Dari pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa jika dalam pelaksanaan suatu program melibatkan banyak pihak yang terlibat dalam struktur organisasinya, maka tidak diherankan jika masyarakat dalam hal ini mengalami masalah dan ingin mengurusnya maka mereka akan kebingungan jika terlalu banyak pihak yang bekerja di dalam pelaksanaannya.

Apa yang telah dipaparkan oleh Kepala Desa Roko-Roko di atas dipertegas pula oleh informan berikut ini tentang orang-orang yang terlibat dalam penyaluran program Raskin:

“ Yang terlibat dalam menyalurkan beras Raskin itu Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Ketua RT, ketua Dusun dan kadang juga kami dipanggil untuk membantu mereka membagikan Raskin karena setiap pembagian Raskin itu kami diroling untuk membagikan Raskin sebanyak 5 orang tiap-tiap pembagian” (Wawancara dengan Ibu Murni Tanggal 25 Januari 2017).

Apa yang telah dipaparkan oleh informan di atas dipertegas pula oleh informan berikut tentang orang-orang yang terlibat dalam penyaluran program Raskin berikut ini:

“ Menurut saya yang terlibat dalam penyaluran Raskin itu Kepala Desa dan semua aparat-aparat Desa. selain itu, kerena berdasarkan kesepakatan Kepala Desa setiap penyaluran Raskin itu kami selalu dilibatkan untuk membagikan Raskin” (Wawancara dengan Ibu Ramina Tanggal 15 Januari 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa yang terlibat dalam penyaluran Raskin di Desa Roko-Roko, yaitu Kepala Desa, Aparat-aparat Desa dan berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah Desa masyarakat juga ikut terlibat dalam membagikan Raskin.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Raskin antara lain: (a) faktor komunikasi dalam implementasi program Raskin di Desa Roko-Roko yaitu masih kurangnya diadakan komunikasi dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat sehingga pengetahuan masyarakat tentang program Raskin kurang dimengerti. (b) faktor sumber daya, dalam hal sumber daya manusia dalam hal memberikan pelayanan untuk pendistribusian Raskin belum memadai. Hal

ini terbukti aparat pelaksana program Raskin yang bertugas untuk membagikan atau mendistribusikan Raskin kepada masyarakat tidak dilayani dengan baik. (c) faktor disposisi, dalam rangka pelaksanaan implementasi program Raskin di Desa Roko-Roko terkait tingkat komitmen dan kejujuran masih rendah. masih ada saja permasalahan yang terjadi di dalam pelaksanaan penyaluran Raskin. Salah satunya yaitu harga Raskin tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp 1.600,00/kg, melainkan di atas ketentuan yang berlaku di titik distribusi. (d) struktur birokrasi, Program Raskin di Desa Roko-Roko yang terkait dalam bidang tugas kegiatan yang melakukan program Raskin melibatkan banyak pihak sehingga tidak mudah untuk menyatukan langkah dalam melaksanakan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2013. *Kesejahteraan Sosial: Pekerjaan Sosial, Pembangunan sosial, dan Kajian Pembangunan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan*. Bandung: Aldi Bandung Pusat KPEW Lemit UNPAD
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2011*. BPS: CV Nario Sari.
- Darwin, Mahadjir. 2005. *Memanusiaikan Rakyat: Penanggulangan Kemiskinan sebagai Arus Utama Pembangunan*. Yogyakarta: Benang Merah.
- Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog. 2008. *Pedoman Umum Program Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Tahun 2012*. Jakarta: Depdagri dan Bulog.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI Direktorat Jendral Informasi Dan Komunikasi Publik. 2011. *Program Penanggulangan Kemiskinan Cabinet Indonesia Bersatu II*. Jakarta
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 2014. *Pedoman Umum Raskin 2014*. Jakarta
- Lubis, Dj. 2004. *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional*. Jakarta: TKP3KPK Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Moleong, J Lexi. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Soewadji, Jusuf. 2012. *Pegantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhariyanto, Kecuk. 2011. *Jumlah Si Miskin*. Kompas
- Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabeta
- Tohirin. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rajawali Pers

- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- World Bank. 2006. *Era Baru dalam Pengetasan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: World Bank.
- (<http://bag-ekonomi.malangkab.go.id//petunjuk/program/raskin> (diakses pukul 11.20 wite, Tanggal 07 April 2017)).
- (<http://data.tnp2k.go.Id/filedata/publikasi/kemenko/pedoman/umum/penyaluran/raskin/2012.pdf>, diakses Pukul 16.00 Wite, Tanggal 15 oktober 2016).
- (<http://sivalimanews.com//kriteria/penentu/raskin> (diakses pukul 11.00 wite, Tanggal 17 April 2017)).
- (<http://www.academia.edu//Implementasi-program-beras-untuk-keluarga-miskin> (diakses pukul 11.15 wite, Tanggal 07 April 2017)).
- TNP2K. 2013. "Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia." <http://www.tnp2k.go.id/program/sekilas> (diaksesPukul 16.20 Wite, Tanggal 10 oktober 2016).
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2014*. "http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&id_subyek=23 (diakses Pukul 18.30 Wite, tanggal 21 November 2016).